

PENGINTEGRASIAN DATA *ELECTRONIC GOVERNMENT* KE DALAM WEBSITE

PEMERINTAH DAERAH

Triatmojo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura
e-mail : Triatmojo_3@ymail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Pengintegrasian Data *Electronic Government* ke Dalam *Website* Pemerintah Daerah. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Pengintegrasian Data *Electronic Government* ke Dalam *Website* Pemerintah Daerah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah belum maksimalnya Pengintegrasian Data *Electronic Government* ke Dalam *Website* Pemerintah Daerah melalui beberapa pentahapan. Pentahapan tersebut antara lain. tahap yang pertama, tahap interpretasi, yaitu sosialisasi mengenai penyajian informasi di lakukan setiap tahunnya sehingga dapat diketahui mengenai kemajuan dari implementasi program *electronic government* melalui *website* penyelenggaran Pemerintah Kota Singkawang. Tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian belum adanya standar prosedur operasi pada Bagian pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang sehingga dalam melakukan pekerjaan dapat dilakukan secara optimal, sumber daya manusia mengenai pejabat yang belum diisi pada Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak agar segera melakukan pengisian pejabat pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dengan terus berkoordinasi petugas bagian pengelola data SKPD terkait agar data yang disampaikan sesuai dengan permintaan Bagian PDE Setda Kota Singkawang, Penetapan Jadwal Kegiatan berdasarkan *time schedule* yang telah dibuat agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dapat terlaksana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Serta ketiga, tahap aplikasi yaitu koordinasi yang tidak begitu baik dengan petugas pengelola data SKPD dalam mengumpulkan data, aplikasi website masih hanya sampai pada tahap publish memberikan informasi dan mendownload data. Serta hosting pada website yang masih menumpang pada Pontianak Post sehingga apabila hosting tersebut putus maka pengunjung yang mengakses website tersebut mengalami gangguan.

Kata Kunci: Implementasi Program *Electronic Government*, Interpretasi Data SKPD, Pengorganisasian *Website*, Aplikasi ke dalam Program.

ABSTRACT

The Entitled of this article "Integrating Data Electronic Government to Local Government Website". This Article is intended to describe and analyze the Integrating Data Electronic Government to Local Government Website The conclusion of this research is not maximal Integrating Data Electronic Government to Local Government Website several phases. Phasing among others. The first stage, the Phase Interpretation is socialization of the presentation information that doing each year that can be known about the progress from implementation government electronic program through the website of implementation Singkawang City Government. The second stage, the stage of organizing the lack of standard operating procedures on Electronic Data processing Section Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang so in doing the work can be done optimally, the human resources official who has not been charged in the Sub Division Manager of Information Systems and Software to immediately fill officials at the Sub Division of Information Systems and Software Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang, management determination to continue implementing coordinated policy officer on education-related data management to ensure data submitted in accordance with Demand Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Singkawang City, Determination of Activity Schedule by time schedule has been made to the implementation of programs and activities on the Bagian Pengolah Data Elektronik Singkawang City can be accomplished predetermined. And the last , the application stage which isn good coordinate with the data management officers on education in collecting data, The application site is still only reached the stage of published information and data download. As well as hosting on the website still ride in Pontianak Post,so when the hosting is broken or disconnect then the visitors who access the website also impaired.

Keyword : Implementation Electronic Government Program, Interpretasi Data, Organization Website,

Application to Program

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penggunaan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology* atau ICT) telah berkembang luas, dimana tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan saja, namun bidang-bidang lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan, perdagangan, perekonomian dan sebagainya. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang baru bagi pemerintah karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai efisiensi dan efektivitas proses kerja pemerintah. Hal ini kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Berbagai aplikasi diciptakan dalam mewujudkan sistem kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kebutuhan untuk meningkatkan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat menuntut pemerintah untuk secepatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya dikenal sebagai *electronic government*.

Inisiatif *e-government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-government*. Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *electronic government*. Lebih jauh lagi, *electronic government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Jaringan internet merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai *website*, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Melalui *website* ini masyarakat dapat mengetahui potensi daerah dan mengetahui tentang jalannya pemerintahan.

Salah satu dari program *electronic government* yaitu Situs *website* Pemerintah Daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *electronic government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi.

Situs *Website* Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Singkawang yaitu singkawangkota.go.id dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat maupun kepada Pegawai yang mengakses *website* singkawangkota.go.id

Adapun informasi yang masuk dalam kategori tersedia dalam pengelolaan *website* www.Singkawangkota.go.id yaitu seluruh kebijakan badan publik atau satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, transparansi anggaran. Sebagai contoh, supaya masyarakat atau wisatawan baik itu domestik maupun internasional apabila ingin mengunjungi Kota Singkawang harus mencari informasi mengenai objek wisata apa saja yang ada pada daerah tersebut. Salah satu cara untuk mencari informasi tersebut bisa menggunakan *website* www.Singkawangkota.go.id, akan tetapi pada *website* tersebut belum memasukan data objek wisata yang ada pada Kota Singkawang.

Selain itu juga fenomena-fenomena yang muncul pada saat pra penelitian adalah adanya keluhan dari masyarakat lewat buku tamu pada *website* tersebut. Salah satu contoh yaitu mengenai lambannya publikasi video pelantikan Walikota Singkawang sehingga menyebabkan data tidak *up to date*. Kemudian pada sarana dan prasarana, *website* www.Singkawangkota.go.id, *hosting* masih menumpang pada Pontianak Post di Pontianak. Ketika *hosting* tersebut mengalami gangguan akan menyebabkan *website* tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat atau seseorang yang ingin membuka *website* tersebut.

Mencermati penerapan *website* www.Singkawangkota.go.id, terlihat belum dimanfaatkannya secara maksimal oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang yaitu untuk mengambil data, staf bagian pengolah data elektronik yang akan mengambil data masih mendatangi masing-masing unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dipublikasikan data nya walaupun telah ada penunjukkan staf pada masing-masing SKPD. Pengupdatean informasi pada *website* belum dilakukan *up to date* data pada *website*.

Selain itu juga, pada Kepala Sub Bagian Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang masih kosong belum ada pejabat yang hingga saat ini mengisi jabatan tersebut sehingga tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat

Lunak dibebankan kepada Kepala Sub Bagian Pengolah Data dan Sarana Teknologi Informasi, jenis pelayanan pada *website* singkawang.go.id hanya pada tahap *publish*.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang berkaitan dengan pelaksanaan program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, melalui beberapa pentahapan yakni

1. Tahap Intepretasi
2. Tahap Pengorganisasian
3. Tahap Aplikasi

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan proses Implementasi *e-government* Melalui Penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan ,maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah proses implementasi program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang. Adapun Informan yang menjadi Subjek penelitian ini meliputi:

1. Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Ferdy Gumai, S.Sos.M.Si.Pimpinan sebagai pengambil keputusan pada unit kerjanya sehingga diwawancarai.
2. Kasubag Pengolahan Data dan Sarana Teknologi Informasi, Heru Susanto.S.Kom.Yaitu bagian yang menangani sarana dan prasarana sehingga diwawancarai.
3. Beberapa sumber daya aparatur pada Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Singkawang;
Yaitu staf pelaksana yang menangani langsung melakukan pengolahan data elektronik sehingga diwawancarai.
 - a. Penyaji Data Base Kota dan Infrastruktur Jaringan yaitu Fajar Kristanto.
 - b. Pengolah Bahan Kebijakan Perhubungan Komunikasi dan Informatika yaitu Andrie yadiartanto, S.Kom.
 - c. Penyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi yaitu Chrimawati Romauli.S, S.Kom.
 - d. Pengelola Data Base Sistem Informasi yaitu Susana, S.Kom.
4. Sub bidang mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawng. Ari Sastriyana, S.STP. yaitu Bagian yang melakukan penataan pejabat struktural pegawai sehingga diwawancarai.

5. Petugas Pengelola Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang, Eko Subyanto,SP.MT.Yaitu Petugas yang mengelola data pada kantor.
6. Petugas Pengelola Data Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Singkawang, Dra.Elina yaitu Petugas yang mengelola data pada kantor
7. Masyarakat, Andi yaitu Orang yang mengakses *website*

Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan dan teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Model yang digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan ini ialah Model implementasi Charles O'Jones (dalam Widodo, 2006:96), mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, :

1. Tahap Intepretasi, yaitu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi intepretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut :

"The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do... If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementation of policies, views that may be different from those of their superiors". (Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan ... Jika kebijakan harus diterapkan dengan benar, arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan,

pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka) (dalam Jones, 1984:178).

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tahap interpretasi juga merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional. (dalam Widodo, 2006: 90).

Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (walikota atau bupati) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Interpretasi kebijakan tersebut tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah kebijakan tersebut. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan sehingga akan dapat menerima, mendukung pelaksanaan kebijakan yang ada.

2. Tahap Pengorganisasian, merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*sources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Adapun variabel dalam tahap pengorganisasian yaitu:

a. Pelaksana kebijakan (Policy implementor), pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah, sektor swasta, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat.

b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*), setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sarasannya, apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sarasannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Keuangan, Peralatan dan Manusia, besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan baik itu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga dengan peralatan dan sumber daya manusia yang cukup dan memadai sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan, manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini ditekankan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan. Apabila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan, agar pelaksanaan kebijakan menjadi baik dalam proses pelaksanaan kebijakan maka perlu ada jadwal kebijakan. Jadwal kebijakan tersebut harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan.

3. Tahap Aplikasi, merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.

Jones (1984:180) menyatakan bahwa *Application simply refers to doing the job. It includes "providing goods and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense)*. Aplikasi hanya mengacu pada melakukan pekerjaan. Ini termasuk "menyediakan barang dan jasa" serta tujuan program lainnya (sebagai contoh, regulasi dan pertahanan).

Application is often a dynamic process in which the implementor are enforcer is guided

generally by program directives or standards and specifically by actual circumstances. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. (Jones, 1984:180).

Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones:

Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. (dalam Jones, 1991:325).

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan:

Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. (dalam Jones, 1991: 328)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan *the establishment of policy goals*, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (*to be effectively and efficiently*) dalam pengelolaan data secara elektronik pada Bagian Pengelolaan Elektronik Setda Kota Singkawang.

D. PENGINTEGRASIAN DATA ELECTRONIC GOVERNMENT KE DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Dari pemahaman Implementasi program dan melihat permasalahan yang ada mengenai implementasi program *Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Pemerintah Kota Singkawang* dapat digambarkan bahwa implementasi

program program *electronic government* belum berjalan secara maksimal.

Dengan melihat pernyataan tersebut di atas telah membuktikan bahwa implementasi *electronic government* melalui Penyelenggaraan Website Pemerintah Kota Singkawang masih belum berjalan dengan efektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada pembahasan ini penulis akan menganalisis proses implementasi *electronic government* melalui penyelenggaraan website Pemerintah Kota Singkawang.

Implementasi program kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah instansi maupun organisasi. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan.

Beberapa pentahapan dalam proses implementasi disinyalir memiliki peran penting dalam mempengaruhi implementasi program *electronic government* melalui penyelenggaraan website Pemerintah Kota Singkawang.

1. Tahap Intepretasi

Tahap Intepretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional.

Dalam proses implementasi program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, diketahui bahwa upaya Pemerintah Kota Singkawang melalui Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang telah tegambar secara jelas baik itu dari kebijakan strategis berupa adanya misi Walikota Singkawang yang termuat dalam Peraturan Daerah Walikota Singkawang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2008-2012 yaitu pada misi mempercepat pelaksanaan tata pemerintah yang baik. Pada misi tersebut menggambarkan upaya pemerintah kota singkawang agar dapat memberikan pelayanan informasi yang efektif dengan mempublikasikan data secara elektronik melalui *website* Pemerintah Daerah yaitu Singkawankota.go.id. Begitu juga pada kebijakan Sekretariat Daerah yaitu Optimalisasi pengembangan *electronic government*. Sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut program *electronic government* yang ada pada Pemerintah Kota Singkawang khususnya pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dapat

terselenggara dengan baik pada *website* singkawangkota.go.id.

Kebijakan manajerial yang berupa Surat Edaran Walikota Singkawang tentang Pengguna nama domain Situs Web resmi Pemerintah Kota Singkawang, dengan adanya domain *website* singkawangkota.go.id. tersebut maka setiap informasi maupun data perkembangan data pemerintah Kota Singkawang dapat dipublikasikan atau ditampilkan melalui *website* tersebut

Serta kebijakan teknis operasional berupa Surat Permintaan Data dan mana Petugas Pengolah Data, dengan adanya surat tersebut maka diwajibkan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang agar dapat menyampaikan data SKPDnya melalui petugas Pengolah Data sehingga hasil dari data yang telah di serahkan kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dapat dipublikasikan pada *website* singkawangkota.go.id.

Sebagai upaya Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang agar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dapat memahami tentang tujuan program *electronic government*. Bagian PDE setda Kota Singkawang telah melakukan sosialisasi mengenai penyajian informasi secara elektronis berbasis *website*. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang diharapkan dapat mendukung penuh terselenggaranya program *electronic government* melalui *website* Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Kebijakan Strategis pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik mengatakan:

“Bahwa kebijakan umum atau strategis tertera dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2008-2012. Misi ke ke IV ”Mempercepat Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik”. Dan Misi electronic government juga terkandung isu stratetis untuk melakukan pengoptimalan electronic government”. Hal yang sama mengenai kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik mengatakan: “yaitu dikeluarkan atau diterbitkannya Surat Edaran Walikota Singkawang Nomor SE:550/135/PDE situs web resmi Pemerintah Kota Singkawang..... Serta kebijakan teknis operasional yaitu mengirimkan surat melalui Sekretaris Daerah Kota Singkawang kepada SKPD PemKotv Singkawang untuk dapat mengirimkan data dan nama petugas pengolah data di SKPDnya”.

Sebagai upaya arah kebijakan dari program *electronic government* Bagian Pengolah Data

Elektronik Setda Kota Singkawang supaya tersebut jelas arah dan kebijakannya dimengerti maka telah dilaksanakannya sosialisasi penyajian informasi secara elektronis berbasis *website*

Berdasarkan hal tersebut pentingnya sosialisasi penyajian informasi secara elektronis berbasis *website* sehingga SKPD dapat mengetahui kebijakan dari program *electronic government*.

2. Tahap Pengorganisasian

Organisasi dalam hal ini merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Pada tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*) atau SOP, sumber daya, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, dan penetapan jadwal kegiatan.

Pada tahap pengorganisasian ini sebagai upaya untuk mencapai pencapaian tujuan dari implementasi program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang dapat terlaksana yaitu melakukan pengumpulan data dengan berkoordinasi melalui petugas pengelola data pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang untuk dilakukan penghimpunan data oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sehingga data yang telah ada diolah dan di tampilkan pada *website* Singkawangkota.go.id.

Dalam upaya tersebut juga Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang setiap tahunnya mengirmkan surat permintaan data pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, dan tahun 2012 sehingga SKPD tersebut tidak lupa untuk mengirimkan datanya kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang. Bagian PDE Setda Kota Singkawang akan melakukan inventarisir SKPD yang belum mengirimkan data dengan melakukan pengecekan pada buku inventarisasi data sehingga dapat diketahui SKPD mana saja yang belum mengumpulkan data.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses implementasi program optimalisasi pelayanan air bersih di Kecamatan Pontianak Barat, Standar Prosedur Operasi belum ada karena ini bentuk dari pertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada staf yang bersangkutan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan supaya didapat hasil yang sempurna dan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan Standar Operasi Prosedur Operasi, staf pengolah kebijakan Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa :

Kita disini belum adanya SOP sehingga jika ada suatu pekerjaan ada petunjuk-petunjuk teknis dalam bekerja. Diharapkan untuk ke depannya pihak pimpinan membuat SOP tersebut untuk mempermudah dalam bekerja”.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dikemukakan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasi bahwa belum adanya SOP dalam suatu pekerjaan dikhawatirkan tidak dimanfaatkan secara maksimal tahapan-tahapan dalam pekerjaan oleh aparatur Bagian PDE sehingga nantinya tujuan yang telah ditetapkan oleh Bagian PDE dapat berjalan dengan lancar yang sesuai jika ada petunjuk ataupun arahan dalam Standar Operasi Prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sumber daya manusia yang ada pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Kasubang Pengolah Data dan Satana Teknologi Informasi mengatakan:

“Sumber daya manusia pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang yaitu “Pegawai atau staf yang ada di Bagian Pengolah Data Elektronik tersebut berlatar belakang pendidikan 1 (satu) orang S1 Manajemen informatika pada Sub Bagian Data dan Sarana Teknologi dan 2 orang berpendidikan S1 teknologi informatika pada Sub Bagian Sarana Informasi dan Perangkat Lunak”.

Namun salah satu Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik mengalami kekosongan sejak tahun 2011 hal ini tentunya tugas-tugas yang ada pada Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak akan mengalami kendala tidak berjalan secara optimal.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kasubag Pengolah Data dan Satana Teknologi Informasi mengatakan:

“Tugas-tugas yang saya tangani menjadi bertambah dikarenakan pejabat yang mengisi jabatan Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak sampai dengan saat ini belum ada yang mengisi jabatan tersebut, ini merupakan kemauan saya tapi ya sudahlah akan saya jalani sesuai juga pada tugas dan fungsi pada Sub Bagian informasi dan Perangkat Lunak yang diberikan oleh pimpinan”.

Jadi disini dengan adanya beban kerja yang bertambah maka tugas dan fungsi pada sub Bagian Informasi dan dan Perangkat Lunak nantinya tidak akan berjalan secara optimal. Hal ini terus diupayakan dengan menyurati Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang agar jabatan pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat lunak dapat terisi.

Triatmojo

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Dari beberapa hal mengenai Sumber Daya Manusia, dapat disimpulkan bahwa staf atau aparatur yang ada pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi terlihat ada beberapa staf yang berlatar belakang pendidikan komputer. Selain itu juga demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang agar jabatan tersebut segera diisi oleh pejabat yang berkompeten dan agar Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut sehingga tidak lagi mengganggu tugas Sub Bagian Pengolah Data dan Sarana Teknologi Informasi sebagai akibat dari kekosongan jabatan tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk proses implementasi program program *e-government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Sipada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sumber daya keuangan yang ada pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Kasubang Pengolah Data dan Satana Teknologi Informasi mengatakan:

*“Pelaksanaan *electronic government* khususnya pada Bagian Pengolah Data Setda Kota Singkawang merupakan inisiatif pemerintah Kota Singkawang yang mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pihak legislatif yang menyetujui anggaran sekitar Rp 635.313.375,- pada tahap awal TA 2009 untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pemeliharaan *website* Singkawangkota.go.id sebesar Rp 108.400.000,-.*

Dari beberapa hal mengenai sumber daya keuangan, dapat disimpulkan bahwa respon pemerintah Kota Singkawang melalui Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sangat mendukung terhadap upaya program *electronic government* terlihat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang dari tahun 2009 sampai dengan 2012.

Sedangkan untuk peralatan atau infrastruktur Adapun peralatan atau infrastruktur teknologi yang telah dipersiapkan oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sumber daya keuangan yang ada pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, staf informasi dari informan penyaji data base dan infrastruktur jaringan mengatakan:

*“Penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang diantaranya pemasangan jaringan Sistem*

Inforansi Local Area Network (LAN), jumlah komputer yang tersedia dalam pengolahan data elektronik yaitu: (1) Komputer: sebanyak 3 unit, (2) Komputer Server sebanyak 4 unit, (3) Ups sebanyak 1 unit, (4) Stabilizer sebanyak 1 unit, (5) Rack Server sebanyak 1 unit, (6) Mikrotik sebanyak 2 unit, (7) Nano Station sebanyak seri 5 sebanyak 8 unit, (8) Nano Station seri 2 sebanyak 2 unit, (9) Antena Grid sebanyak 3 unit, (10) Laptop sebanyak 2 unit, (11) DVR cctv sebanyak 2 unit, (12) Nvr cctv sebanyak 2 Unit, (13) Kamera CCTV yg sudah di pasang sebanyak 16 Unit, (14) Kamera Ip yg sudah di pasang sebanyak 4 Unit”.

Dari beberapa hal peralatan, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur atau peralatan sangat dibutuhkan supaya program *electronic government* dapat berjalan dengan lancar. Namun sebaiknya pembelian peralatan-peralatan tersebut benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Bagian PDE Setda Kota Singkawang.

Dalam Manajemen pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait Manajemen Pelaksaaan Kebijakan yang ada pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Staf informan penyaji data base dan infrastruktur jaringan mengatakan:

“Koordinasi yang kita lakukan disini yaitu dengan melibatkan petugas pengelola data pada masing-masing SKPD untuk dapat rutin mendistribusikan atau menyerahkan data sesuai dengan permintaan meskipun ada juga petugas SKPD yang belum mendistribusikan atau menyerahkan datanya”.

Dari beberapa hal mengenai Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan, dapat disimpulkan bahwa bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang yaitu dengan melalui sms ataupun telpon, namun jika masih ada yang belum menyampaikan datanya maka Bagian PDE akan ke SKPD tersebut untuk mengambil data sesuai dengan permintaan.

Dalam Jadwal pelaksanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu disusun jadwal pelaksanaan kebijakan. Fungsi *time schedule* supaya

kegiatan yang dilaksanakan atau direncanakan pada tahun tersebut memuat gambaran kapan dimulai dan diakhiri kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan yang ada pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Staf informan penyaji data base dan infrastruktur jaringan mengatakan:

*“Untuk menetapkan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan kegiatannya terlebih dahulu kita akan membuat *time schedule* atau perencanaan kegiatan selama satu tahun pada Tahun Anggaran berjalan”. *Time schedule* ini akan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah khususnya pada Bagian Pengolah Data Setda Kota Singkawang”*

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penetapan jadwal kegiatan dengan menggunakan *time schedule* tersebut maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terlaksana sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya meskipun terkadang *time schedule* tersebut terkadang ada hal yang diluar prediksi pada saat membuat *time shcedul*nya.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Sesuai Instruksi Presiden Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Govenrment*, serta Surat Edaran Walikota Singkawang 50/135/PDE tentang domain Singkawangkota.go.id dalam pengaplikasiannya program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, sebagai *leading sector* Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang belum berjalan dan optimal.

Dalam tahap aplikasi ini, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan data tersebut ada yang rutin ataupun sama sekali tidak mengumpulkan data sehingga mengakibatkan data pada *website* singkawangkota.go.id tidak secara lengkap data yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut yang tidak memberikan datanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai Tahap Aplikasi Program *electronic government* pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Pengelola Data Base Sistem Informasi mengatakan:

Namum dalam aplikasinya ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang yang belum rutin untuk memberikan data SKPDnya,

untuk yang rutin sih enak mas nah kalau yang tidak rutin ini buat kita repot jak sehingga pihak Bagian PDE sendiri turut langsung mengambil data ke SKPD yang belum memberikan atau menyerahkan datanya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai Tahap Aplikasi Program *electronic government* pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Petugas Pengelola Data SKPD mengatakan:

“Bahwa kita selalu memberikan data sesuai dengan permintaan dari Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dan mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Bagian PDE, akan tetapi kami selalu berupaya agar data yang terkumpul tersebut benar-benar lengkap hanya saja permasalahan dikantor mengingat kami juga sibuk dalam menjalankan program dan kegiatan kantor lainnya”

Jadi berdasarkan hal tersebut diatas, supaya data yang tersampaikan dan lengkap maka perlu diupayakan diantaranya peran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Singkawang agar selalu mengingatkan staf yang ditunjuk sebagai petugas pengelola data pada masing-masing SKPD agar memberikan data tersebut kepada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan hendaknya petugas yang ditunjuk untuk mengelola data pada SKPD benar-benar pegawai yang tidak mempunyai rangkap kerja, dan apabila petugas pengelola data SKPD di mutasi supaya cepat dilakukan pergantian jangan sampai tidak ada petugas pengelola data pada SKPD yang kosong .

Selain itu juga, dalam tahap aplikasi ini jika ada SKPD yang belum mengumpulkan atau menyerahkan datanya tersebut sesuai dengan permintaan maka Bagian PDE sendiri akan langung turun ke SKPD tersebut untuk mengambil datanya sehingga memerlukan waktu lagi untuk menghimpun data tersebut dan diolah pada webite singkawangkota.go.id.

Pada program *electronic government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang ini jenis pelayanan yang diberikan pada *website* Singkawangkota.go.id hanya sampai pada tahap *Publish* yaitu komunikasi satu arah dimana, pemerintah mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai jenis Pelayanan *website* Program *electronic government* pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Penyaji Data Base Kota dan Infrastruktur Jaringan mengatakan:

“Untuk sekarang kita hanya membuat *website* sebatas hanya untuk memberikan data informasi perkembangan pemerintahan Kota Singkawang, siapa saja dapat melihat data dan informasi mengenai roda pemerintahan Kota Singkawang dan bisa mendownload produk hukum peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh DPRD”

Perlunya penambahan-penambahan aplikasi lainnya pada *website* singkawangkota.go.id sehingga *website* tersebut menjadi *website* yang multifungsi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai penambahan aplikasi *website* Program *electronic government* pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, masyarakat pengakses *website* mengatakan:

“Bahwa isi dari *website* singkawangkota.go.id isinya sudah cukup baik meskipun diperlukan penambahan-penambahan seperti belum adanya peraturan ataupun keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh Walikota Singkawang supaya kite warga masyarakat Singkawang dapat melihat informasi tersebut”.

Masih menggunakan atau menyewa hosting pada Pontianak Post di Pontianak, jiwa sewaktu-waktu hosting tersebut mengalami gangguan mengakibatkan terputusnya akses ke *website* Singkawangkota.go.id sehingga informasi dan data tidak dapat diakses oleh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Singkawang atau pengunjung yang ingin melihat *website* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai Penggunaan *hosting* pada Implementasi Program *Electronic Government* melalui penyelenggaraan *website* Pemerintah Kota Singkawang, Pengelola Data Base Sistem Informasi mengatakan:

“Saat ini memang benar Bagian PDE masih menggunakan atau menyewa hosting pada Pontianak Post sejak 01 Oktober 2013 yang sebelumnya juga masih menumpang atau menggunakan hosting pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta”.

Penggunaan hosting yang tidak mandiri atau menumpang pada pihak swasta mengakibatkan jika sewaktu-waktu *hosting* pada Pontianak Post dilakukan perbaikan server seperti dilakukan *scanning* antivirus maka yang terkena dampaknya adalah *website* singkawangkota.go.id yang sehingga apabila ada yang mengakses *website* tersebut akan mengalami gangguan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada penulis mengambil

kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.1.1. Tahap Intepretasi

Tahap Intepretasi, pada Kebijakan strategis ini memuat Misi Kota Singkawang serta kebijakan dalam misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang dalam pengembangan *electronic government* pada kebijakan dan Kebijakan manajerial yaitu Surat Edaran Walikota tentang penetapan domain *website* singkawangkota.go.id. yang selanjutnya tindak lanjut surat ke SKPD lingkungan Kota Singkawang pada kebijakan teknis operasional. Supaya dalam kebijakan program *electronic government* dapat berjalan maka harus mengkomunikasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah supaya arah dan kebijakan dari program tersebut jelas. Bentuk dari pengkomunikasian tersebut yaitu Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang telah melakukan sosialisasi melalui penyajian informasi berbasis *website*.

Saran yang disampaikan berkenaan dengan hal tersebut yaitu, Pada tahap intepretasi, hendaknya sosialisasi mengenai penyajian informasi di lakukan setiap tahunnya sehingga dapat diketahui mengenai kemajuan dari implementasi program *electronic government* melalui *website* penyelenggaran Pemerintah Kota Singkawang.

5.1.2 Tahap Pengorganisasian

Dalam proses Implementasi Program *Electronic Government* penyelenggaraan pada *Website* Pemerintah Kota Singkawang yaitu:

- Pelaksana kebijakan, dalam proses implementasi *electronic government* yaitu Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang serta melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Singkawang.
- Standar Prosedur Operasi (*standard operating procedure*), belum adanya SOP pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sehingga mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan stafnya belum optimal.
- Sumber Daya keuangan, manusia dan peralatan. Adanya dukungan dana dari pemerintah Kota Singkawang, pihak legislatif sehingga program *electronic government* dapat terlaksana, serta sumber daya manusia yang berlatar belakang ilmu komputer telah memadai, untuk jabatan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak yang belum terisi dan juga peralatan atau infrastruktur telah tersedia meskipun nantinya kedepannya akan ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan.
- Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya koordinasi dengan petugas pengelola data

pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang cukup baik.

- Penetapan jadwal kegiatan berdasarkan *time schedule*, Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dalam melakukan kegiatan menggunakan *time schedule*.

Saran yang disampaikan berkenaan hal tersebut yaitu Pada tahap Pengorganisasian dalam hal pelaksana kebijakan supaya dapat melibatkan unsur swasta agar lebih lengkap lagi data yang ada pada *website*, hendaknya dibuat standar prosedur operasi pada Bagian pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sehingga dalam melakukan pekerjaan dapat dilakukan secara optimal, sumber daya manusia mengenai pajabat yang belum diisi pada Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak agar Badan Kepegawaian Daerah Kota Singkawang untuk segera melakukan pengisian pejabat pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dengan terus berkoordinasi petugas bagian pengelola data SKPD terkait agar data yang disampaikan sesuai dengan permintaan Bagian PDE Setda Kota Singkawang dan jika petugas pengelola data SKPD tersebut mutasi supaya dapat dilaporkan kepada Bagian PDE Setda Kota Singkawang untuk dilakukan pergantian petugas, Penetapan Jadwal Kegiatan berdasarkan *time schedule* yang telah dibuat agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang dapat terlaksana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4.13. Tahap Aplikasi,

Implementasi proses *electronic government* penyelenggaraan *website* pada Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kota Singkawang sudah cukup efektif dan efisien meskipun ada beberapa hal diantaranya masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang masih belum mengumpulkan datanya sehingga staf Bagian PDE akan turun langsung ke SKPD terkait guna mengambil datanya. Kemudian pada *website* singkawangkota.go.id hanya menampilkan komunikasi satu arah yaitu pada tahap *publish* memberikan fasilitas informasi dan mendownload data, serta untuk hosting yang masing menumpang pada Pontianak Post jiwa sewaktu-waktu hosting tersbut mengalami gangguan maka, jika ada yang mengaksesnya maka tidak dapat terakses pada *website* singkawangkota.go.id.

Saran yang disampaikan berkenaan dengan hal tersebut yaitu, Pada tahap aplikasi, yaitu dengan memberikan batas waktu untuk melalukan pengumpulan data kepada Bagian Pengolah Data

Elektronik Setda Kota Singkawang dan berkoordinasi dengan petugas pengolah data masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang data yang sudah ada dapat ditampilkan pada *websiste* singkawangkota.go.id, serta melakukan pemberitahuan kepada Bagian PDE Setda Kota Singkawng jika ada petugas yang mutasi. Kemudian melakukan penambahan aplilasi pada *website* singkawangkota.go.id sehingga *website* tidak saja berfungsi menampilkan informasi saja, tetapi berfungsi juga sebagai sarana interaksi, serta dengan adanya pembelian perangkat *hosting* pada Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kota Singkawang sehingga meminimalisir terputusnya akses pada *website* Singkawangkota.go.id. meskipun dari segi teknis membutuhkan biaya yang tidak begitu sedikit dalam upaya pengembangan pengelolaan *electronic government* di Pemerintah Kota Singkawang dapat berjalan secara optimal.

E. REFERENSI

Buku-buku :

- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the studi of public policy*: Brooks Cole Pub.co.Monterey, Calif.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik Cet 1*. Jakarta: Rajawali.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Medika.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : TRIATMOJO
NIM / Periode Lulus : E21111121 / 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Email address/HP : Triatmojo_3@gmail.com / 08981390613

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGINTEGRASIAN DATA *ELECTRONIC* GOVERNMENT KE DALAM *WEBSITE*
PEMERINTAH DAERAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

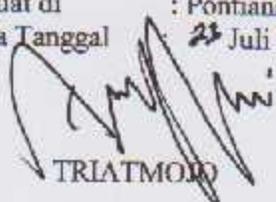
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. ERDI, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 23 Juli 2014


TRIAMOJO